

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Di tengah pertumbuhan ekonomi rakyat yang cepat di era modern, koperasi masih dianggap memiliki peran strategis dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, baik sebagai wadah partisipasi ekonomi maupun sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan bersama (Hilal et al., 2022). Sehingga pemerintah saat ini melakukan berbagai upaya untuk mendukung kehidupan ekonomi rakyat, menunjukkan komitmen mereka untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang baik.

Berdasarkan (Peraturan Pemerintah, 2021) menyatakan, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi terbagi menjadi beberapa jenis salah satunya yakni koperasi primer. Koperasi primer adalah koperasi yang dibentuk sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang sedangkan Koperasi Sekunder adalah koperasi yang di bentuk sekurang-kurangnya 3(tiga) Koperasi.

Sedangkan pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan dari koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka

mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Oleh karena itu koperasi merupakan suatu alat yang ampuh bagi pembangunan serta suatu wadah, dimana kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok tergabung sedemikian rupa. Sehingga melalui kegiatan kelompok, kepentingan pribadi para anggota menjadi kekuatan pendorong yang memberikan manfaat bagi seluruh anggota kelompok tersebut. Kelompok tersebut bisa terjadi jika kelompok itu secara relatif homogen dan setiap anggotanya mampu memberikan kontribusi yang nyata (Peraturan Pemerintah, 2021)

Kepentingan ini dalam (Purba & Barelang, 2018) menyatakan bahwa koperasi menjadi penggerak dalam memberikan manfaat bagi masyarakat, maka dengan begitu koperasi harus dikelola dengan benar dan profesional. Sebuah koperasi yang sehat akan memiliki pengelolaan profesional dalam semua bidang, termasuk bidang keuangan. Sebagai lembaga ekonomi, akuntansi koperasi adalah salah satu masalah terpenting yang dihadapi oleh koperasi. Oleh karena itu, akuntansi koperasi adalah salah satu bagian koperasi yang paling sering ditinjau dan diteliti oleh insan koperasi.

Menurut data terbaru dari (Kementerian Koperasi dan UKM, 2024) koperasi di Indonesia yang masih aktif pada tahun 2024 berjumlah 130.354 atau 0,18%. Jumlah ini meningkat di banding pada tahun sebelumnya hanya sebanyak 130.119 unit. Angka ini menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang percaya pada model ekonomi koperasi sebagai solusi untuk kesejahteraan manusia. Sektor yang paling aktif adalah koperasi simpan pinjam dan koperasi pertanian yang

mencatat pertumbuhan anggota sebesar 12% dan 8%. Peningkatan ini didorong oleh kebutuhan masyarakat akan akses mudah terhadap layanan keuangan dan dukungan dalam sektor pertanian. Di DKI Jakarta terpatnya pada kabupaten Jakarta Timur koperasi yang aktif berjumlah 1.313 termasuk koperasi lembaga perlindungan saksi dan korban yang belum menerbitkan laporan keuangan secara lengkap dengan berpedoman SAK ETAP dalam penerapannya

Koperasi juga membuat laporan keuangan, yang dapat memberikan gambaran kinerja keuangannya. Laporan keuangan yang dibuat oleh suatu koperasi adalah salah satu bentuk pertanggung jawaban kepada pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Mengenai aktivitas bisnis yang dilakukan dalam waktu tertentu. Perencanaan, pengevaluasian, penilaian, dan pertanggung jawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti anggota koperasi, investor, kreditur, dan pemerintah yang dapat dilakukan dengan bantuan laporan keuangan ini (Frasawi et al., 2016).

Pada dasarnya, penyusunan laporan keuangan memerlukan suatu pedoman agar laporan keuangan yang tersaji dapat tersusun sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sehingga adanya keragaman. Dengan adanya keseragaman ini, memudahkan pembaca untuk membandingkannya dengan laporan keuangan lain dan laporan keuangan sebelumnya. Di Indonesia, empat standar yang dikenal sebagai "empat pilar standar akuntansi" membentuk standar akuntansi yang berlaku: Standar Akuntansi Keuangan (SAK), Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), Standar Akuntansi Keuangan Syariah

(SAK SYARIAH), dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (Purba & Barelang, 2018).

Salah satu wujud nyata kontribusi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) terhadap perkembangan koperasi di Indonesia adalah dengan diterbitkannya Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 mengenai Akuntansi Perkoperasian. Koperasi merupakan salah satu entitas yang termasuk dalam kategori untuk menerapkan SAK – ETAP (Meitasari & Istikhoroh, 2021). Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan data tentang kondisi keuangan, hasil kinerja keuangan dan laporan arus kas suatu organisasi. Data ini memberikan keuntungan kepada berbagai penerima manfaat dalam membuat keputusan pada bidang ekonomi, terlepas apakah mereka memiliki akses untuk meminta laporan keuangan yang spesifik untuk memenuhi kebutuhan informasi mereka. Para pihak yang memiliki kepentingan juga dikenal sebagai (*stakeholders*) dapat menginterpretasikan laporan keuangan dengan cara yang sebanding (Harefa & Serniati, 2023)

Berdasarkan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia, laporan keuangan yang lengkap meliputi lima (5) jenis laporan, yakni: laporan laba rugi atau hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan (CALK) (Almujab & Budiutomo, 2017).

**Tabel 1.1**  
**Data Laporan Pertumbuhan Koperasi Lembaga Pegawai Perlindungan Saksi dan Korban**

<b>Tahun</b>	<b>Laporan Laba Rugi</b>	<b>%</b>	<b>Neraca</b>	<b>%</b>
2023	Rp 136.595.508	16,65%	Rp 788.051.864	12,91%
2022	Rp 117.095.508	17,70%	Rp 697.965.596	-0,86%
2021	Rp 99.486.072	14,89%	Rp 704.050.490	13,66%

Sumber : Koperasi LPSK, 2024

Berdasarkan tabel di atas laporan laba rugi koperasi lembaga pegawai perlindungan saksi dan korban tahun 2021 sebesar Rp 99.486.072 atau 14,89% dan laporan neraca yang dihasilkan pada tahun 2021 sebesar Rp 704.050.490 atau 13,66%. Tahun 2022 laporan laba rugi sebesar Rp 117.095.508 atau 17,70% mengalami kenaikan yang pesat dari tahun sebelumnya, laporan neraca yang dimiliki sebesar Rp 697.965.596 atau -0,86% mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Sedangkan tahun 2023 laporan laba rugi mengalami peningkatan sebesar Rp 136.595.508 atau 16,65% hal ini disebabkan karena adanya keberhasilan dalam aktivitas usaha dan efisiensi operasional, diikuti dengan kenaikan neraca sebesar Rp 398.426.132.476 atau 12,91% yang menggambarkan ekspansi koperasi dan pengelolaan dana yang baik sehingga memberikan keseimbangan antara pengelolaan passiva yang dimiliki.

Penelitian ini merupakan replikasi dari (Meitasari & Istikhoroh, 2021) adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu, studi

kasus atau subjek yang diteliti penulis tepatnya pada koperasi pegawai lembaga perlindungan saksi dan korban. Selain itu, penelitian ini juga replikasi dari (Purba & Barelang, 2018) dengan perbedaan pada variabel dependen yang digunakan yaitu seberapa besar SAK ETAP dalam menyajikan laporan keuangan koperasi.

Nyatanya koperasi pegawai lembaga perlindungan saksi dan korban adalah salah satu dari banyak koperasi yang belum sepenuhnya menerapkan SAK ETAP. Suatu koperasi dapat gagal menerapkan SAK ETAP karena beberapa alasan. Faktor eksternal termasuk kurangnya pelatihan akuntansi koperasi dan kurangnya pengawasan dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut. Faktor internal termasuk kurangnya pemahaman tentang SAK ETAP, yang menyebabkan informasi laporan keuangan tidak akurat dan tidak disajikan dengan benar.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Penerapan SAK ETAP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Koperasi Pada Koperasi Pegawai Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Di Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman pengelola koperasi pegawai lembaga perlindungan saksi dan korban terhadap prinsip-prinsip SAK ETAP dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan.
2. Kurangnya transparansi, akurasi, dan penyajian informasi keuangan pada koperasi pegawai lembaga perlindungan saksi dan korban.
3. Koperasi pegawai lembaga perlindungan saksi dan korban belum sama sekali menerapkan SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangannya sesuai dengan pedoman yang berlaku.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

Apakah penerapan SAK ETAP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan koperasi pada koperasi pegawai lembaga perlindungan saksi dan korban?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui pengaruh penerapan SAK ETAP terhadap kualitas laporan keuangan koperasi pada koperasi pegawai lembaga perlindungan saksi dan korban.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Peneliti berharap bahwa penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, diantaranya sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan kemampuan analisis penulis dalam memahami penerapan SAK ETAP dan bagaimana penerapan tersebut dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan koperasi. Selain itu, penelitian ini juga menjadi kontribusi ilmiah penulis yang dapat menjadi standarisasi di bidang akuntansi.

2. Bagi Koperasi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan rekomendasi yang bermanfaat bagi pengelolaan koperasi dalam menerapkan SAK ETAP secara lebih optimal guna meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sehingga dengan begitu, koperasi dapat meningkatkan kepercayaan anggota dan pihak terkait lainnya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi atau landasan awal bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan kajian lebih mendalam terkait penerapan SAK ETAP pada koperasi di masa yang akan datang.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Kajian Teoritis**

##### **2.1.1 Laporan Keuangan**

###### **a. Pengertian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, di mana informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan suatu perusahaan.

Menurut (Hasibuan & Indayani, 2020) pengertian laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi dan merupakan informasi historis. Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk membentuk pertimbangan dan mengambil keputusan yang tepat bagi pemakai informasi tersebut

(Sundjaja & Inge, 2004) menyatakan bahwa laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan data keuangan atau aktivitas

###### **b. Tujuan Laporan Keuangan**

Menurut (IAI, 2009) tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

- 2) Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dan kejadian di masa lalu.
- 3) Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Sedangkan sebagaimana dikemukakan (Wilestari & Safitri, 2020) tujuan utama dari laporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang mencakup perubahan dari unsur-unsur laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam menilai kinerja keuangan terhadap perusahaan di samping pihak manajemen perusahaan. Para pemakai laporan akan menggunakannya untuk meramalkan, membandingkan dan menilai dampak keuangan yang timbul dari keputusan ekonomis yang diambilnya. Informasi mengenai dampak keuangan yang timbul tadi sangat berguna bagi pemakai untuk meramalkan, membandingkan dan menilai keuangan. Seandainya nilai uang tidak stabil, maka hal ini akan dijelaskan dalam laporan keuangan.

Laporan keuangan akan lebih bermanfaat apabila yang dilaporkannya tidak saja aspek-aspek kuantitatif, tetapi mencakup penjelasan-penjelasan lainnya yang dirasakan perlu dan informasi ini harus faktual serta dapat diukur secara objektif.

Beberapa tujuan laporan keuangan dari berbagai sumber di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Informasi posisi laporan keuangan yang dihasilkan dari kinerja dan aset perusahaan sangat dibutuhkan oleh para pemakai laporan keuangan, sebagai bahan evaluasi dan perbandingan untuk melihat dampak keuangan yang timbul dari keputusan ekonomis yang diambilnya.
- 2) Informasi keuangan perusahaan diperlukan juga untuk menilai dan meramalkan apakah perusahaan di masa sekarang dan di masa yang akan datang sehingga akan menghasilkan keuntungan yang sama atau lebih menguntungkan.
- 3) Informasi perubahan posisi keuangan perusahaan bermanfaat untuk menilai aktivitas investasi, pendanaan dan operasi perusahaan selama periode tertentu. Selain untuk menilai kemampuan perusahaan, laporan keuangan juga bertujuan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi.

### **c. Jenis Laporan Keuangan Koperasi**

Jenis laporan keuangan koperasi menurut (Fadhila et al., 2022) laporan keuangan koperasi terdiri dari :

- 1) Perhitungan Hasil Usaha adalah suatu laporan yang menunjukkan kemampuan koperasi dalam menghasilkan laba selama suatu periode akuntansi atau satu tahun. Laporan hasil usaha harus merinci hasil usaha yang berasal dari anggota dan laba yang diperoleh dari aktivitas koperasi dengan bukan anggota
- 2) Neraca adalah suatu daftar yang menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki koperasi, serta informasi dari mana sumber daya tersebut diperoleh.

- 3) Laporan arus kas adalah suatu laporan mengenai arus kas keluar dan arus kas masuk selama suatu periode tertentu, yang mencakup saldo awal kas, sumber penerimaan kas, sumber pengeluaran kas dan saldo akhir kas pada suatu periode.
- 4) Laporan promosi ekonomi anggota adalah laporan yang menunjukkan manfaat ekonomi yang diterima anggota koperasi selama suatu periode tertentu.

Laporan tersebut mencakup 4 unsur yaitu:

- a) Manfaat ekonomi dari pembelian barang atau pengadaan jasa bersama
- b) Manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengolahan bersama
- c) Manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi
- d) Manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha

#### **d. Laporan Keuangan Koperasi**

Laporan keuangan koperasi harus mempunyai kualitas seperti dapat diandalkan, relevan, akurat, tepat waktu dapat diperbandingkan. Hal ini tidak terlepas dari pengetahuan pengurus koperasi dalam menyusun laporan keuangan koperasi. Pengurus koperasi sedikit sekali yang berlatar belakang berpendidikan di bidang akuntansi sehingga penyusunan laporan keuangan belum menggunakan Standar Akuntansi Keuangan. Laporan keuangan yang disusun baru menggunakan format yang sederhana belum menggunakan Standar yaitu Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) (Ahmadi, 2020).

Berdasarkan karakter yang spesifik dari badan usaha koperasi yaitu dengan karakter utama adalah posisi anggota koperasi sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi, maka laporan keuangan koperasi pun akan mempunyai karakter yang spesifik juga bila dibandingkan dengan badan hukum usaha-usaha yang lain antara lain adalah :

- 1) Laporan keuangan koperasi merupakan pertanggungjawaban pengurus selama satu periode akuntansi untuk bahan penilaian kinerja pengelolaan koperasi.
- 2) Laporan keuangan koperasi ditujukan untuk pihak internal koperasi dan pihak eksternal koperasi.
- 3) Laporan keuangan koperasi harus berdaya guna bagi anggotanya untuk mengetahui :
  - a) Prestasi koperasi dalam hal pelayanan kepada anggota dalam satu periode akuntansi
  - b) Prestasi koperasi dalam hal pelayanan kepada non anggota dalam satu periode akuntansi.

Sedangkan karakter laporan keuangan koperasi secara kualitatif adalah sebagai berikut:

- 1) Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang

aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketentuan yang wajar

## 2) Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan cara membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

## 3) Materialistis

Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.

## 4) Keandalan

Agar bermanfaat, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus andal. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material dan bias, dan penyajian secara jujur apa yang seharusnya disajikan atau yang wajar diharapkan dapat disajikan.

## 5) Substansi mengungguli bentuk

Transaksi, peristiwa dan kondisi lain dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan bentuk hukumnya.

## 6) Pertimbangan sehat

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset

atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah. Pertimbangan yang sehat tidak mengizinkan bias. Penyusunan laporan keuangan harus menggunakan pertimbangan yang sehat.

7) Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan material biaya.

8) Dapat dibandingkan

Pengguna laporan keuangan harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan.

9) Tepat waktu

Tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan

10) Keseimbangan biaya dan manfaat

Manfaat informasi seharusnya melebihi biaya penyediaannya.

## 2.1.2 Koperasi

### a. Pengertian Koperasi

Kata koperasi berasal dari bahasa latin “*Coopere*” dan diserap dalam bahasa Inggris menjadi *Cooperation*. Co berarti bersama dan operation berarti bekerja, sehingga *Cooperation* adalah bekerja sama atau berusaha bersama-sama. Dalam hal ini kerja sama tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama dengan tujuan yang sama (Fadhila et al., 2022).

Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan atau pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya, atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya, dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan soko guru perekonomian nasional. Dikatakan sebagai soko guru karena modal dan kegiatan usaha dilakukan secara bersama-sama dan hasilnya juga untuk kesejahteraan anggotanya secara bersama-sama (Yanto et al., 2017)

Definisi Koperasi Menurut :

- 1) Rudianto dalam (Zakky, 2018) koperasi adalah perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis.
- 2) Dr. G. Mladenata, didalam bukunya “*Histoire Desdactrines Cooperative*” mengemukakan bahwa koperasi terdiri atas produsen-produsen yang secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama, dengan saling bertukar jasa secara

kolektif dan menanggung risiko bersama, dengan mengerjakan sumber-sumber yang disumbangkan oleh anggota.

- 3) H.E Erdman, dalam bukunya "*Passing Monoply As A Naim Of Cooperative*" bahwa koperasi adalah usaha bersama, merupakan badan hukum, anggota ialah pemilik dan yang menggunakan jasanya dan mengembalikan semua penerimaan di atas biayanya kepada anggota sesuai dengan transaksi yang mereka jalankan dengan koperasi.

Bila dirinci dari definisi di atas tersebut, maka beberapa pokok pemikiran sebagai berikut :

- a) Koperasi adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas yang bertujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi anggotanya.
- b) Melayani anggota yang macam pelayanannya sesuai dengan macam koperasi.
- c) Bentuk kerja sama di dalam organisasi koperasi bersifat terbuka dan sukarela
- d) Masing-masing anggota koperasi mempunyai hak dan kewajiban yang sama
- e) Masing-masing anggota koperasi berkewajiban untuk mengembangkan serta mengawasi jalanya koperasi
- f) Risiko dan keuntungan koperasi ditanggung dan dibagi secara adil.

### **b. Pengertian Koperasi di Indonesia**

Dasar hukum pasal 33 ayat (1) UUD 1945 tentang perekonomian menegaskan bahwa “ perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” dan ayat (4) dikemukakan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan”, sedangkan menurut pasal 1 UU No. 25, yang dimaksud dengan koperasi di Indonesia adalah : “ Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan” (Peraturan Pemerintah, 2015).

### **c. Prinsip Koperasi**

Prinsip koperasi menurut Undang-undang nomor 25 Tahun 1992 Pasal 5 sebagai berikut :

- 1) Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi yaitu :
  - a) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
  - b) Pengelolaan dilakukan secara demokratis
  - c) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
  - d) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
  - e) Kemandirian
- 2) Dalam mengembangkan Koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi yaitu :

- a) Pendidikan perkoperasian
- b) Kerja sama antar koperasi

#### **d. Tujuan Koperasi**

Dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3, disebutkan bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Berdasarkan pasal tersebut, tujuan koperasi pada garis besarnya meliputi 3 hal yaitu:

- 1) Memajukan kesejahteraan anggotanya
- 2) Memajukan kesejahteraan masyarakat
- 3) Ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional

#### **e. Jenis-Jenis Koperasi**

- 1) Jenis Koperasi menurut fungsinya :
  - a) Koperasi pembelian/pengadaan/konsumsi adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi pembelian atau pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota sebagai konsumen akhir. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pembeli atau konsumen bagi koperasinya.
  - b) Koperasi pemasaran adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai

di tangan konsumen. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pemasok barang atau jasa kepada koperasinya.

- c) Koperasi produksi adalah koperasi yang menghasilkan barang dan jasa, di mana anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan koperasi. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pekerja koperasi.
- d) Koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota, misalnya : simpan pinjam, asuransi, angkutan dan sebagainya. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pengguna layanan jasa koperasi
- e) Apabila koperasi menyelenggarakan satu fungsi disebut koperasi tunggal usaha (*single purpose cooperative*), sedangkan koperasi yang menyelenggarakan lebih dari satu fungsi disebut koperasi serba usaha (*multi purpose cooperative*)

2) Jenis Koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerjanya sebagai berikut:

- a) Koperasi Primer adalah koperasi yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang perseorangan
- b) Koperasi Sekunder adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer. Koperasi sekunder dapat dibagi menjadi :

1. Koperasi pusat yaitu koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5
2. Koperasi primer gabungan yaitu koperasi yang anggotanya minimal 3
3. Koperasi pusat induk koperasi yaitu koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi

3) Jenis Koperasi menurut status keanggotaannya :

- a) Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya para produsen barang/jasa dan memiliki rumah tinggal usaha.
- b) Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau pemakai barang/jasa yang ditawarkan para pemasok di pasar
- c) Kedudukan anggota di dalam koperasi dapat berada dalam salah satu status atau keduanya. Dengan demikian pengelompokan koperasi menurut status anggotanya berkaitan erat dengan pengelompokan koperasi menurut fungsinya.

#### **f. SHU Koperasi**

Pembagian Sisa Hasil Usaha koperasi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang nomor 25 tahun 1992 Pasal 45 ayat 1 yang menyatakan bahwa SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan (PP, 2015)

Penggunaan SHU ini ditetapkan dalam AD dan ART koperasi yang diputuskan melalui rapat anggota. Pada umumnya, pembagian SHU ini terdiri dari pos-pos sebagai berikut:

- 1) Cadangan
- 2) Jasa anggota berdasarkan simpanan/modal
- 3) Jasa anggota berdasarkan pinjaman
- 4) Dana pengurus
- 5) Pengelola koperasi
- 6) Dana pendidikan pegawai
- 7) Dana pengembangan koperasi
- 8) Dana sosial

Terdapat beberapa prinsip dalam pembagian Sisa Hasil Usaha Koperasi antara lain:

- 1) SHU yang dibagi adalah bersumber dari anggota
- 2) SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri
- 3) Pembagian SHU dilakukan secara transparan
- 4) SHU anggota di bayar tunai.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa semakin besar transaksi (usaha dan modal) anggota dengan koperasi maka akan semakin besar SHU yang diterima, semakin tinggi jumlah SHU yang diterima maka akan semakin besar alokasi balas jasa terhadap anggota dan akan meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi.

### 2.1.3 SAK -ETAP

#### a. Pengertian SAK-ETAP

SAK-ETAP merupakan SAK yang berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK Umum, sebagian besar menggunakan konsep biaya historis, mengatur transaksi yang dilakukan oleh ETAP, bentuk pengaturan yang lebih sederhana dalam hal perlakuan akuntansi dan relatif tidak berubah selama beberapa tahun (IAI, 2013).

Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang:

- 1) Tidak memiliki publik signifikan.
- 2) Tidak akuntabilitas menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose statement*) eksternal. bagi Contoh financial pengguna pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit. SAK ETAP terpisah dari SAK besar dimana SAK ETAP dalam pedoman penyusunan laporan keuangan dibuat lebih sederhana. (Sen Yung 2010)

Kehadiran Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) diharapkan dapat memberikan kemudahan untuk UKM dan koperasi dalam menyajikan laporan keuangan. Tujuan dari SAK-ETAP adalah untuk memberikan kemudahan bagi entitas skala kecil dan menengah dalam menyajikan laporan keuangan yang tidak berbasis IFRS. Berdasarkan ruang lingkup SAK-ETAP, maka Standar Akuntansi Keuangan ini bermaksud digunakan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik yang dimaksud adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan luar (*Eksternal*).

Tujuan dari SAK-ETAP yaitu memberikan kemudahan bagi perusahaan skala kecil dan menengah. SAK yang berbasis IFR (SAK Umum) dimaksudkan untuk perusahaan yang memiliki tanggung jawab publik dan perusahaan yang beroperasi lintas negara. SAK umum masih begitu sulit untuk dipahami dan diterapkan oleh sebagian besar perusahaan di Indonesia yang berskala kecil dan menengah. Sedangkan SAK-ETAP lebih mudah dipahami dan memberikan banyak kemudahan bagi perusahaan dibandingkan dengan SAK Umum dengan ketentuan pelaporan yang lebih kompleks.

#### **b. Ruang Lingkup SAK-ETAP**

- 1) Menurut IAI (IAI, 2009) SAK-ETAP dimaksudkan untuk digunakan oleh Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik ( ETAP), yaitu entitas yang :
  - a) Tidak mempunyai akuntabilitas secara signifikan.
  - b) Menerbitkan laporan keuangan dengan tujuan umum bagi pengguna eksternal, contoh : pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur dan lembaga pemeringkat kredit
- 2) Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika :
  - a) Telah mengajukan pernyataan pendaftaran atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran pada otoritas pasar modal dan regulator lain untuk penerbitan efek di bursa efek.
  - b) Menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas akuntansi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, dan reksa dana

- 3) Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK-ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan SAK-ETAP. Contoh: Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

### c. Perbedaan Laporan Keuangan PSAK dengan SAK-ETAP

Berikut tabel perbedaan laporan keuangan PSAK dan SAK-ETAP

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan laporan keuangan PSAK dan SAK-ETAP**

No	Keterangan	PSAK Umum	SAK-ETAP
1	Penyajian Laporan Keuangan	Informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan	Sama dengan PSAK
2	Laporan laba rugi	Menggunakan istilah laba rugi komprehensif	SAK-ETAP tetap menggunakan istilah laporan laba rugi
3	Penyajian perubahan ekuitas	Sama dengan PSAK kecuali untuk beberapa hal yang terkait pendapatan komprehensif lain	Sama dengan PSAK kecuali untuk beberapa hal yang terkait pendapatan komprehensif lain
4	Laporan arus kas	Arus aktivitas operasi menggunakan metode langsung dan tidak langsung	Arus kas aktivitas operasi hanya menggunakan metode tidak langsung
5	Catatan atas laporan keuangan	1) Struktur 2) Pengungkapan kebijakan akuntansi 3) Modal (ED PSAK1) Pengungkapan lain	Sama dengan PSAK kecuali pengungkapan modal

Sumber: IAI, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, IAI, Jakarta, 2015.

Menurut martani Hadari (2011) menyebutkan bahwa perbedaan antara SAK Umum dan SAK-ETAP diantaranya meliputi :

1) Konsep pajak penghasilan

Dalam hal mengatur pajak penghasilan, SAK-ETAP menggunakan konsep pajak terutang, sedangkan SAK Umum menggunakan konsep pajak tangguhan

2) Metode penyusunan arus kas

Metode penyusunan laporan arus kas yang diatur dalam SAK umum ialah metode langsung dan tidak langsung, perusahaan diberikan pilihan sesuai kebijakan perusahaan. Sedangkan SAK-ETAP hanya menggunakan metode tidak langsung, metode ini dianggap lebih efektif bagi UKM karena biaya penyusunan arus kas lebih murah dibandingkan dengan metode langsung.

3) Metode pengukuran aset tetap dan aset tidak berwujud

Berdasarkan SAK-ETAP, aset tetap dan aset tidak berwujud dicatat dan diukur sebesar biaya perolehannya pada saat pengakuan pertama. Sedangkan pada SAK Umum menggunakan dua model pengukuran yaitu model biaya dan model nilai wajar yang harus diterapkan secara konsisten.

4) Perbedaan SAK-ETAP dan SAK umum tidak hanya terletak pada kompleksitas isinya tetapi juga pada dasar pengukuran. SAK-ETAP menggunakan dasar pengukuran berbasis historical cost sedangkan SAK umum menggunakan basis fair value

Secara umum, terdapat perbedaan utama antara SAK-ETAP dan PSAK IFRS. Perbedaan tersebut adalah :

- a) SAK-ETAP tidak mengatur pajak tangguhan.
- b) SAK-ETAP hanya menggunakan metode tidak langsung (indirect method) dalam laporan arus kas.

- c) SAK-ETAP menggunakan cost model untuk investasi ke asosiasi, dan menggunakan metode ekuitas untuk anak perusahaan.
- d) SAK-ETAP tidak secara penuh menggunakan PSAK5 50/55, SAK-ETAP hanya menggunakan cost model untuk aset tetap, aset tidak berwujud dan properti investasi.

Dengan diberlakukannya SAK-ETAP pada tanggal 1 Januari 2011, maka sebagian besar wajib pajak di Indonesia harus menggunakan SAK-ETAP untuk laporan keuangan pada tahun 2011. Jika suatu perusahaan laporan keuangannya mematuhi SAK-ETAP, maka perusahaan tersebut harus membuat suatu pernyataan yang jelas bahwa laporan keuangannya sesuai dengan SAK-ETAP dalam catatan atas laporan keuangan.

#### **d. Penerapan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK-ETAP**

Menurut SAK-ETAP (2017,12) Laporan keuangan Entitas meliputi :

##### 1) Neraca

Neraca adalah laporan yang memberikan informasi rinci mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pemilik suatu entitas (Tomasui et al., 2020)

informasi yang disajikan dalam neraca mencakup pos-pos berikut :

- a) Kas
- b) Piutang
- c) Persediaan
- d) Properti Investasi
- e) Aset Tetap
- f) Aset tidak berwujud

- g) Utang
- h) Aset dan kewajiban pajak
- i) Kewajiban diestimasi

Entitas menyajikan pos, judul, dan sub jumlah lainnya dalam neraca jika penyajian seperti itu relevan dalam rangka pemahaman terhadap posisi keuangan entitas. SAK-ETAP tidak menentukan format atau urutan terhadap pos-pos yang disajikan.

## 2) Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memuat pendapatan dan beban tahunan perusahaan sehingga hasil akhirnya menunjukkan laba atau rugi. Laporan laba rugi memuat semua penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode kecuali SAK-ETAP mensyaratkan lain. SAK-ETAP mengatur perlakuan berbeda terhadap dampak koreksi atas kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi yang disajikan sebagai penyesuaian kepada periode yang lampau dan bukan sebagai bagian dari laba atau rugi dalam periode terjadinya perubahan.

Berikut adalah informasi yang disajikan di laporan laba rugi, laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos sebagai berikut :

- a) Pendapatan
- b) Beban keuangan
- c) Bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas
- d) Beban pajak

e) Laba atau rugi neto

### 3) Laporan perubahan ekuitas

Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas koperasi yang menggambarkan peningkatan atau penurunan kekayaan bersih koperasi selama periode tertentu. Tujuan laporan perubahan ekuitas yaitu membantu perusahaan untuk memperoleh gambaran dari aktiva bersih pada periode tertentu apakah mengalami penurunan atau peningkatan.

### 4) Laporan arus kas

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menggambarkan penerimaan kas dan pembayaran kas tahunan. SAK-ETAP menyebutkan bahwa laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi yang relevan mengenai pembayaran dan penerimaan kas selama satu periode.

### 5) Catatan laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan harus memuat pengungkapan kebijakan suatu entitas yang mengakibatkan perubahan perlakuan akuntansi dan pengungkapan informasi lainnya.

Menurut (IAI, 2013) Catatan atas laporan harus :

- a) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu.

- b) Menyajikan informasi yang terdapat dalam SAK-ETAP tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan.
- c) Menyajikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi saling berhubungan untuk memahami laporan keuangan.

Urutan penyajian catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK-ETAP.
2. Rangkuman kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan .
3. Informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan yang sesuai dengan urutan penyajian setiap komponen laporan keuangan dan urutan penyajian pos-pos tersebut
4. Pengungkapan lain

## 2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti/Tahun	Judul	Teknis Pengumpulan Data	Hasil
1	Eva Malina Simatupang <sup>1</sup> , Arlina Pratiwi Purba <sup>2</sup> (2018)	Analisis Penerapan Sak Etap Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Koperasi Pegawai Negeri Smpn 7 Pematang Siantar	Studi Kepustakaan	Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan Koperasi SMP N 7 Pematang Siantar. Koperasi Pegawai Negeri Sipil SMP N 7 Pematang Siantar merupakan koperasi yang

				bergerak di bidang usaha simpan pinjam. Laporan keuangan Koperasi SMP N 7 Pematang Siantar belum sesuai dengan standar SAK ETAP.
2	Oeiji Yulianto <sup>1</sup> , Mardiana <sup>2</sup> (2018)	Analisis Penerapan SAK ETAP pada Penyajian Laporan Keuangan PT. Indo Tools Sejahtera	Wawancara, dokumentasi dan obeservasi	Hasil penelitan ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan PT. Indo Tools Sejahtera belum sesuai dengan penyajian laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).
3	Lisman Harefa <sup>1</sup> , Serniati Zebua <sup>2</sup> Maria Magdalena Bate'e <sup>3</sup> , Sophia Molinda Kakisina <sup>4</sup> (2023)	Penerapan Sak Etap Pada Koperasi Dalam Penyajian Laporan Keuangan (Studi Kasus Koperasi Konsumen Tokosa Sahabat Sejati Gunungsitoli	Observasi dengan pendekatan kualitatif	hasil penelitian yang telah dilakukan pada Koperasi Konsumen Tokosa Sahabat Sejati Gunungsitoli ternyata penyajian laporan keuangan masih belum sepenuhnya menerapkan pedoman yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) serta penyusunan

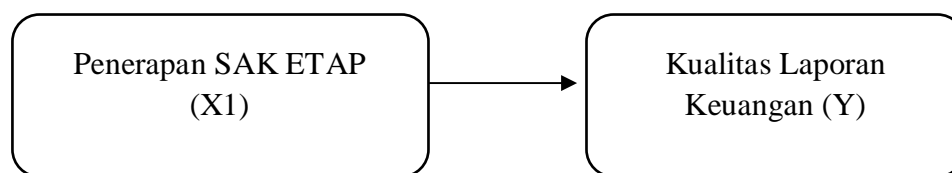
				laporan keuangan Koperasi Konsumen Tokosa Sahabat Sejati Gunungsitoli yang hanya menyajikan: Laporan Laba Rugi, Neraca dan Permodalan. Yang artinya penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan di Koperasi Konsumen Tokosa Sahabat Sejati Gunungsitoli belum sesuai
4	Anggi Meitasari1 , Siti Istikhoroh2 (2021)	Studi Literatur Tentang Penerapan Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Sak Etap) Untuk Menilai Kewajaran Laporan Keuangan Koperasi	Studi literatur dan kajian pustaka	Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menyatakan bahwa penetapan SAK ETAP berpengaruh pada kewajaran laporan keuangan. Hal ini dikarenakan banyak operasi belum melakukan pencatatan yang sesuai.
5	Median Wilestari1 , Dita Safitri2 (2021)	Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, dan pemahaman akuntansi berbasis SAK-ETAP terhadap kualitas laporan keuangan (Studi pada	Staistik dan persamaan struktural	Hasil penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Dan Pemahaman Akuntansi Berbasis SAK-ETAP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan yang terjadi di dalam organisasinya

		Koperasi Simpan Pinjam di Kecamatan Bekasi Selatan)		
--	--	--	--	--

Sumber : Data diolah, 2024

### 2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan landasan dari keseluruhan proses penelitian. Kerangka konseptual menjelaskan hubungan antar variabel, menjelaskan teori yang melandasi hubungan-hubungan serta menjelaskan karakteristik, arah dari hubungan – hubungan tersebut.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

H1: Penerapan SAK ETAP terhadap Kualitas laporan keuangan

### 2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto dalam (Hardani et al., 2020), Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul.

Adapun hipotesis yang diajukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Pengaruh Penerapan SAK ETAP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) merupakan standar pelaporan akuntansi yang dianjurkan kepada entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan menerbitkan laporan

keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Koperasi merupakan bagian dari entitas tanpa akuntabilitas publik sehingga SAK ETAP harus diterapkan dalam penyusunan laporan keuangannya (Permenkop dan UKM No. 04/Per/M.KUKM/VII/2012). SAK ETAP lebih mudah dalam implementasinya namun tetap memberikan informasi yang handal dalam penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan koperasi yang disusun berdasarkan SAK-ETAP, akan membuat informasi yang disajikan menjadi lebih mudah dipahami, mempunyai relevansi, keandalan, dan mempunyai daya banding yang tinggi (IAI, 2016). Implementasi SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangan koperasi sangat ditentukan oleh pemahaman akuntansi dan keuangan dari para pengurus koperasi. Dengan diterapkannya SAK ETAP akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan koperasi (Kusuma dan Budianto, 2013 dan Adiputra., dkk, 2017). Dari uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Penerapan SAK ETAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Koperasi Pegawai Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.